

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah ini didasarkan pada tahapan yang telah ditetapkan pada RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan fokus pada tahun 2014.

Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Gini, Persentase Penduduk Miskin terhadap Total Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan PMA, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 9.1.

Tabel 9.1
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Provinsi Jawa Barat

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016 (Midterm)	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
	1. Daya Beli Masyarakat	ribu rupiah	644.041	644,041	645,000	650,000	655,000	660,000	660,000
	2. PDRB Per Kapita (ADHB)	juta rupiah	21,25 - 21,50	21,25 - 21,50	21,50 – 22,00	22,00 – 24,00	24,00 – 26,00	26,00 – 28,00	26,00 – 28,00
	3. Indeks Gini	Poin	0,4 - 0,39	0,4 - 0,39	0,38 – 0,37	0,37 – 0,36	0,36 – 0,35	0,35 – 0,34	0,35 – 0,34
1.1.1.	Kesehatan								
	4. AHH (Angka Harapan Hidup)	Tahun	68,70 - 68,9	68,70 - 68,9	69 - 69,2	70 - 70,25	70,5 - 71	70,75 - 71,5	70,75 - 71,5
1.1.2.	Pertanian								
	5. Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	109 -110	109	109,5	110	110,5	111	111
1.1.3.	Ketahanan Pangan								
	6. Skor Pola Pangan Harapan	poin	72	74	76	78	80	82	82

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016 (Midterm)	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1.2.1.	Ketenagakerjaan								
	7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	63,80 - 64,00	64,00 - 65,00	65,00 - 66,00	66,00 - 67,00	67,00 - 68,00	68,00 - 69,00	68,00 - 69,00
	8. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,08	9,00 - 8,50	8,50 - 8,00	8,00 - 7,50	7,50 - 7,00	7,00 - 6,50	6,50 - 6,00
1.2.2.	Sosial								
	9. Angka Kemiskinan	Persen	9,52	8,80 - 7,80	7,80 - 6,80	6,80 - 5,90	5,90 - 5,00	5,00 - 4,10	5,00 - 4,10
2	ASPEK PELAYANAN UMUM								
2.1	Fokus Pelayanan Urusan Wajib								
2.1.1.	Pendidikan								
	10. Angka Melek Huruf	Persen	96,97	97,00 - 97,50	97,50 - 98,00	98,00 - 98,50	98,50 - 99,00	99,00 - 99,50	99,00 - 99,50
	11. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,20 - 8,25	8,25 - 8,30	8,30 - 8,50	8,50 - 8,75	8,75 - 9,10	9,10 - 9,50	9,10 - 9,50
	12. APK Sekolah Menengah	Persen	67,78	72,68	80,48	87,48	92,80	94,10	95,50
2.1.3.	Koperasi dan UMKM								

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016 (Midterm)	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	13. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha	orang	4.500	4.750	5.250	5.550	5.750	6.000	6.000
2.1.4.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	14. Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan	Skala 1 - 4	3	3	4	4	4	4	4
	15. Skala Komunikasi Organisasi Pemerintahan	Skala 1 - 7	N/A	3	3,5	4	5	6	6
	16. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum	Persen	57	60	63	65	68	70	70
	17. Indeks Persepsi Korupsi	Poin	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8
	18. Indeks Kebahagiaan	Poin	55 – 57	57 – 59	59 – 61	61 – 63	63 – 65	63 – 65	63 – 65
2.1.4.	Pekerjaan Umum								
	19. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang	Persen	9,6-10,4	10,4-10,8	10,8-11,2	11,2-11,7	11,7-12,3	12,3-13	12,3-13
	20. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi	Persen	11,5-12,03	12,03-25,90	25,90-39,77	39,77-53,64	53,64-67,51	67,51-80	67,51-80
	21. Tingkat Kondisi Baik Jaringan	Persen	64 - 66	66 - 71	71 - 76	76 - 81	81 - 86	86 - 90	86 - 90

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016 (Midterm)	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi								
	22. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	Persen	63-64	64-65	65-67	67-69	69-70	70-71	70-71
	23. Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	54-58	58-63	63-70	70-73	73-74	74-76	74-76
	24. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	Persen	63-63,5	63,5-64	64-65	65-67	67-68	68-69	68-69
2.1.5.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
	25. Rasio Elektrifikasi Rumah	Persen	73-75	75-77	77-78	78-79	79-81	81-83	81-83
2.1.6.	Sosial								
	26. Jumlah PMKS yang ditangani	Orang	334.255	479.255	527.181	579.899	637.888	701.677	771.845
	27. Jumlah Pekerja Anak	Orang	562.815	551.558	540.527	529.717	519.122	508.740	508.740
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi								
	28. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,50 – 73,80	73,80 – 74,00	74,00 – 74,50	74,50 – 75,50	75,50 – 76,00	76,50 – 77,00	76,50 – 77,00
	29. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen per Tahun	5,2 - 5,8	5,9 - 6,5	6,2 - 6,8	6,3 - 6,9	6,3 - 6,9	6,4 - 7	6,4 - 7

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016 (Midterm)	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	30. Laju Pertumbuhan Ekspor	Persen	5,5 – 6,0	6,0 – 6,5	6,5 - 7,0	7,0 – 7,5	7,5 – 8,0	8 – 8,5	8 – 8,5
	31. Inflasi	Persen	8,5 - 9,5	6,0 - 7,0	6,3 - 7,3	4,5 - 5,5	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0
3.1.1.	Penanaman Modal								
	32. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)	Trilyun Rupiah	190	200	210	220	230	250	250
	33. Nilai Investasi/PMTB adhb	Trilyun Rupiah	127,872	142,58	159,69	179,65	203,00	231,42	231,42
3.1.2.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	34. Jumlah Penerbitan Perijinan	Izin	39.029	42.931	47.224	51.946	57.140	62,854	62,854
	35. Indeks Demokrasi	Poin	66,20 – 66,50	66,50 – 67,00	67,00 – 67,50	67,50 – 68,00	68,50 – 69,00	68,50 – 69,00	68,50 – 69,00
	36. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	50	60	70	75	80	85	85
	37. Pendapatan Asli Daerah	Trilyun Rupiah	11,0	12,1	13,3	14,6	16,1	17,7	17,7
	38. Indikator Daya Saing Provinsi	Rangking	6 - 5	5 - 4	4 - 3	3 - 2	2 - 1	2 - 1	2 - 1
3.1.3.	Pendidikan								
	39. APK Pendidikan Tinggi	Persen	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20	20 - 22	22 - 25	22 - 25
	40. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat	Buah	5	10	20	25	30	40	40

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016 (Midterm)	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HAKI								
	41. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas	Orang	11.400.000	12.540.000	13.794.000	15.173.400	16.690.740	18.359.814	18.359.814
3.1.4.	Kependudukan dan Cacatan Sipil								
	42. Jumlah Penduduk	Jiwa	45.284.209	46.035.927	46.800.123	47.577.005	48.366.784	49.169.672	49.169.672
3.1.5.	Lingkungan Hidup								
	43. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah	Persen	36-37	37-38	38-39	39-41	41-43	43-45	43-45
	44. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen per Tahun	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	6-7	6-7
3.1.6.	Pekerjaan Umum								
	45. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik & sedang)	Persen	97,0 - 97,5	97,5-97,7	97,7-97,9	97,9-98,0	98,0-98,5	98,5-99,0	97,0 - 97,5
3.1.7.	Pariwisata								
	46. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	700.000	810.000	950.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
3.1.8.	Kebudayaan								
	47. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk	Buah	3	3	2	2	2	2	2

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2018
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016 (Midterm)	Tahun 2017	Tahun 2018	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	memperoleh HaKI/sertifikasi Badan Internasional								
3.1.9.	Pemuda dan Olahraga								
48.	Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional	Orang	1	2	3	3	4	5	1
3.1.10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
49.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	68.08	69.7	70	72.02	73	73.5	75

Penetapan target kinerja pembangunan Jawa Barat berdasarkan urusan dan kewenangan, memerlukan kerangka sinergitas pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga target kinerja pembangunan tersebut akan terdistribusi ke Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia;
2. Rata – rata Lama Sekolah;
3. Angka Melek Huruf;
4. Angka Harapan Hidup;
5. Daya Beli Masyarakat;
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi;
7. Persentase penduduk miskin;
8. Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
9. Kawasan Lindung

Selanjutnya target masing–masing indikator kinerja pembangunan Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 9.2
Realisasi dan Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Per Kabupaten Dan Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2011	2015	2018
	KABUPATEN			
1	Kab. Bandung	73,41	75,16	76,42
2	Kab. Bekasi	72,10	73,74	74,90
3	Kab. Sumedang	71,68	73,32	74,40
4	Kab. Bandung Barat	72,65	73,44	73,95
5	Kab. Bogor	70,66	72,34	73,43
6	Kab. Purwakarta	70,31	72,13	73,38
7	Kab. Garut	72,21	76,37	78,13
8	Kab. Tasikmalaya	72,93	75,01	76,26
9	Kab. Ciamis	72,97	73,74	74,13
10	Kab. Karawang	70,76	73,20	73,65
11	Kab. Subang	70,43	71,69	72,20
12	Kab. Kuningan	70,11	71,36	72,21
13	Kab. Sukabumi	69,48	71,20	72,16
14	Kab. Majalengka	69,40	70,99	72,02
15	Kab. Cirebon	67,71	69,82	71,18
16	Kab. Cianjur	70,02	75,88	78,12
17	Kab. Indramayu	68,18 <i>(2011)</i>	70,74	71,88
18	Kab. Pangandaran			
	KOTA			
19	Kota Depok	78,36	79,41	80,01
20	Kota Bekasi	75,73	76,92	77,70
21	Kota Cimahi	76,12	76,70 – 77,38	76,70 – 77,38
22	Kota Bandung	75,35	76,42	77,18
23	Kota Sukabumi	75,55	78,29	79,34
24	Kota Bogor	75,16	76,63	76,91
25	Kota Tasikmalaya	73,35	75,01	76,05
26	Kota Cirebon	74,26	76,29	76,84
27	Kota Banjar	75,19	77,09	78,51

2. Rata – rata Lama Sekolah (RLS)

Tabel 9.3
Realisasi dan Target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2011	2015	2018
	KABUPATEN			
1	Kab. Sumedang	7,65	8,35	8,77
2	Kab. Bandung	8,20	8,79	9,04
3	Kab. Bekasi	8,10	8,24	8,31
4	Kab. Bandung Barat	8,00	8,05	8,08
5	Kab. Bogor	7,20	7,64	7,85
6	Kab. Garut	7,47	8,23	8,51
7	Kab. Purwakarta	7,00	7,31	7,46
8	Kab. Subang	6,60	7,33	7,42
9	Kab. Cirebon	6,42	7,00	7,34
10	Kab. Ciamis	7,67	8,04	8,22
11	Kab. Karawang	7,14	7,80	7,95
12	Kab. Tasikmalaya	7,24	7,76	8,08
13	Kab. Majalengka	6,70	6,87	6,95
14	Kab. Kuningan	6,80	6,89	6,93
15	Kab. Cianjur	6,42	6,71	6,85
16	Kab. Sukabumi	6,39	6,66	6,80
17	Kab. Indramayu	5,83 <small>(2011)</small>	6,05	6,15
18	Kab. Pangandaran			
	KOTA			
18	Kota Cimahi	10,73	11,10 – 11,47	11,10 – 11,47
19	Kota Bekasi	10,70	10,92	11,00
20	Kota Depok	10,50	10,78	10,79
21	Kota Bandung	10,10	10,26	10,33
22	Kota Bogor	9,60	9,99	10,04
23	Kota Cirebon	9,20	10,57	10,65
24	Kota Sukabumi	9,00	9,27	9,40
25	Kota Tasikmalaya	9,32	9,90	
26	Kota Banjar	8,33	10,43	12,00

3. Angka Melek Huruf

Tabel 9.4
Realisasi dan Target Angka Melek Huruf (AMH)
Per Kabupaten Dan Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2011	2015	2018
	KABUPATEN			
1	Kab. Bandung	98,60	99,41	99,58
2	Kab. Garut	99,12	99,38	99,45
3	Kab. Tasikmalaya	99,22	99,54	99,70
4	Kab. Karawang	93,25	95,00	96,00
5	Kab. Bandung Barat	98,00	98,10	98,10
6	Kab. Sukabumi	96,60	97,60	98,00
7	Kab. Cianjur	97,68	99,00	99,00
8	Kab. Sumedang	97,50	97,70	97,80
9	Kab. Purwakarta	95,60	96,70	97,60
10	Kab. Ciamis	98,31	99,15	99,57
11	Kab. Cirebon	90,70	93,50	95,40
12	Kab. Majalengka	94,80	95,10	95,20
13	Kab. Bekasi	93,70	94,50	95,10
14	Kab. Kuningan	97,76	100	100
15	Kab. Bogor	93,60	94,50	94,90
16	Kab. Subang	92,40	92,55	92,56
17	Kab. Indramayu	85,68 <i>(2011)</i>	88,90	90,33
18	Kab. Pangandaran			
	KOTA			
19	Kota Tasikmalaya	99,61	99,82	-
20	Kota Bandung	99,60	99,70	99,70
21	Kota Sukabumi	99,60	99,70	99,70
22	Kota Cimahi	99,80	99,83 – 99,86	99,83 – 99,86
23	Kota Bekasi	99,99	100	100
24	Kota Depok	98,90	99,30	99,52
25	Kota Bogor	98,70	98,76	98,79
26	Kota Banjar	99,12	99,44	99,60
27	Kota Cirebon	97,00	98,41	98,42

4. Angka Harapan Hidup

Tabel 9.5
Realisasi dan Target Angka Harapan Hidup (AHH)
per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2011	2015	2018
	KABUPATEN			
1	Kab. Bekasi	68,74	69,71	70,36
2	Kab. Bogor	68,03	69,26	70,09
3	Kab. Subang	69,09	69,46	69,60
4	Kab. Bandung	68,86	69,38	70,17
5	Kab. Bandung Barat	68,58	68,69	68,76
6	Kab. Tasikmalaya	68,30	68,46	68,56
7	Kab. Indramayu	67,23 <small>(2011)</small>	69,75	70,87
8	Kab. Sukabumi	66,43	67,37	67,99
9	Kab. Purwakarta	66,48	67,34	67,92
10	Kab. Kuningan	70,81	71,86	72,39
11	Kab. Ciamis	67,74	68,25	68,50
12	Kab. Sumedang	67,21	67,51	67,72
13	Kab. Karawang	67,32	71,15	73,00
14	Kab. Majalengka	65,82	66,61	67,14
15	Kab. Cianjur	66,70	68,00	68,66
16	Kab. Garut	66,43	68,30	69,28
17	Kab. Cirebon	65,05	65,41	65,66
18	Kab. Pangandaran			
	KOTA			
19	Kota Depok	72,85	73,20	73,40
20	Kota Tasikmalaya	70,20	70,84	70,94
21	Kota Sukabumi	68,92	69,69	70,21
22	Kota Bandung	69,61	69,76	69,87
23	Kota Bekasi	69,70	69,99	70,18
24	Kota Cimahi	69,25	69,65 – 70,05	69,65 – 70,05
25	Kota Bogor	68,68	69,57	69,59
26	Kota Cirebon	68,45	68,51	68,56
27	Kota Banjar	71,12	72,66	73,81

5. Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)

Tabel 9.6
Realisasi dan Target Daya Beli Masyarakat (*Purchasing Power Parity*/PPP)
Per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2011	2015	2018
	KABUPATEN			
1	Kab. Bandung	633,5	644,3	652,1
2	Kab. Sumedang	631,3	643,2	651,3
3	Kab. Bekasi	632,4	643,0	651,1
4	Kab. Purwakarta	630,6	641,6	649,8
5	Kab. Majalengka	628,6	641,0	649,5
6	Kab. Garut	640,91	673,28	686,12
7	Kab. Indramayu	642,64 <small>(2011)</small>	666,77	677,48
8	Kab. Kuningan	550,70	558,80	562,85
9	Kab. Cirebon	626,8	637,7	645,0
10	Kab. Ciamis	641,71	642,08	642,27
11	Kab. Bandung Barat	629,2	638,0	643,8
12	Kab. Karawang	635,76	655,00	665,00
13	Kab. Bogor	627,7	633,8	638,8
14	Kab. Sukabumi	623,1	633,3	638,5
15	Kab. Tasikmalaya	629,1	634,9	638,3
16	Kab. Subang	626,3	632,5	637,3
17	Kab. Cianjur	620,40	662,79	662,79
18	Kab. Pangandaran			
	KOTA			
19	Kota Depok	645,9	653,2	658,7
20	Kota Bogor	643,7	652,5	655,4
21	Kota Cirebon	642,3	651,0	657,0
22	Kota Bekasi	639,9	647,5	653,4
23	Kota Sukabumi	632,2	643,4	652,0
24	Kota Bandung	631,8	643,1	651,5
25	Kota Cimahi	638,00	648,00 – 654,00	648,00 – 654,00
26	Kota Tasikmalaya	636,15	652,15	
27	Kota Banjar	579,78	591,08	599,56

6. Kemiskinan

Tabel 9.7
Realisasi dan Target Kemiskinan
Per Kabupaten dan Kota

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2011	2015	2018
	KABUPATEN			
1	Kab. Cirebon	20,25	17,05	15,55
2	Kab. Indramayu	16,01 <small>(2011)</small>	14,50 – 15,00	14,50 – 15,00
3	Kab. Sumedang	15,18	13,27	12,33
4	Kab. Kuningan	13,35	9,95	8,25
5	Kab. Majalengka	18,79	14,14	11,14
6	Kab. Garut	12,77	10,80	9,96
7	Kab. Bandung Barat	17,61	12,13	9,47
8	Kab. Karawang	12,04	11,75	11,50
9	Kab. Subang	15,15	10,65	7,45
10	Kab. Bogor	12,11	8,97	6,97
11	Kab. Cianjur	13,17	9,91	5,88
12	Kab. Ciamis	9,60	7,52	6,70
13	Kab. Purwakarta	11,61	7,65	4,05
14	Kab. Tasikmalaya	12,36	11,00	10,00
15	Kab. Bekasi	5,89	4,60	3,50
16	Kab. Sukabumi	13,26	7,54	3,47
17	Kab. Bandung	9,42	3,83	1,54
18	Kab. Pangandaran			
	KOTA			
19	Kota Cirebon	14,11	11,92	11,32
20	Kota Tasikmalaya	18,90	14,72	8,37
21	Kota Bogor	9,72	8,64	8,20
22	Kota Sukabumi	9,10	≤ 10,00	≤ 10,00
23	Kota Cimahi	7,15	7,00 – 4,90	7,00 – 4,90
24	Kota Banjar	7,80	7,32	4,12
25	Kota Bekasi	6,02 <small>(2011)</small>	5,62	5,37
26	Kota Bandung	4,42	4,28	3,05
27	Kota Depok	2,69	2,35	2,06

7. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 9.8
Realisasi dan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi
Per Kabupaten dan Kota

No	Kabupaten/Kota	REALISASI	PROYEKSI	
		2011	2015	2018
	Kabupaten			
1	Kab. Ciamis	4,99	4,95	5,02
2	Kab. Karawang	6,26	6,70	7,00
3	Kab. Purwakarta	4,99	6,49	7,61
4	Kab. Bandung	5,30	6,86	7,38
5	Kab. Bogor	5,58	6,69	7,06
6	Kab. Indramayu	2,14	4,81	6,29
7	Kab. Garut	5,57	5,36	5,17
8	Kab. Bekasi	6,07	6,18	6,23
9	Kab. Cianjur	5,08	5,25	5,95
10	Kab. Cirebon	4,91	5,60	5,83
11	Kab. Sumedang	4,58	5,28	5,69
12	Kab. Majalengka	4,57	5,18	5,49
13	Kab. Bandung Barat	5,08	5,39	5,44
14	Kab. Subang	4,74	5,01	5,15
15	Kab. Kuningan	4,73		
16	Kab. Sukabumi	3,89	4,16	4,25
17	Kab. Tasikmalaya	4,32	4,50 – 5,50	4,50 – 5,50
18	Kab. Pangandaran			
	Kota			
19	Kota Bandung	7,83	7,97	7,97
20	Kota Depok	6,65	6,78	6,78
21	Kota Sukabumi	6,31	5,00 – 7,00	5,00 – 7,00
22	Kota Bekasi	7,08	6,90 – 7,29	6,90 – 7,29
23	Kota Bogor	6,03	6,05	6,05
24	Kota Cirebon	5,54	5,75	5,75
25	Kota Tasikmalaya	5,89	6,07	
26	Kota Cimahi	5,56	5,75 – 6,00	5,75 – 6,00
27	Kota Banjar	5,40	5,95	6,35

8. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 9.9
Realisasi dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Per Kabupaten Dan Kota

NO	KABUPATEN/KOTA	REALISASI	PROYEKSI	
		2011	2015	2018
	KABUPATEN			
1	Kab. Bandung Barat	9,38	8,13	7,15
2	Kab. Bandung	40,41	9,16	8,18
3	Kab. Karawang	10,06	9,75	9,00
4	Kab. Bekasi	10,27	9,00	8,02
5	Kab. Cirebon	10,17	8,90	7,92
6	Kab. Bogor	10,73	9,48	8,50
7	Kab. Kuningan	4,13	2,89	2,27
8	Kab. Sumedang	8,03	9,78	5,80
9	Kab. Indramayu	10,11 <i>(2011)</i>	8,95	8,60
10	Kab. Subang	9,10	7,80	6,82
11	Kab. Purwakarta	9,48	8,21	7,23
12	Kab. Majalengka	7,80	6,53	5,55
13	Kab. Cianjur	11,26	8,90	7,92
14	Kab. Sukabumi	9,47	8,22	7,24
15	Kab. Tasikmalaya	7,00	6,00 – 7,00	6,00 – 7,00
16	Kab. Garut	5,12	4,81	4,65
17	Kab. Ciamis	5,28	5,99	6,35
18	Kab. Pangandaran			
	KOTA			
19	Kota Sukabumi		≤ 11,50	≤ 11,50
20	Kota Bekasi	12,00	9,80	9,20
21	Kota Bogor	10,31	8,04	7,06
22	Kota Bandung	10,33	9,06	8,08
23	Kota Cimahi	10,30	9,00 – 8,00	9,00 – 8,00
24	Kota Depok	10,59	9,54	8,56
25	Kota Tasikmalaya	9,13	9,04	7,11
26	Kota Cirebon	10,55	9,50	8,52
27	Kota Banjar	6,20	5,80	5,15